

EDISI JUNI 2021

BULETIN

MEDIA CENTER SINGKAWANG



**BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG**

2021

MEDIACENTER.SINGKAWANGKOTA.GO.ID

Ruangan Baru, Perumda AMGP Pacu Kinerja



Perumda Air Minum Gunung Poteng (AMGP) kota Singkawang gelar acara syukuran dan ramah tamah atas renovasi ruangan baru, Senin (31/5/2021). Acara syukuran dan ramah tamah ini dihadiri oleh Wali kota Singkawang, Tjhai Chui Mie dan Sekda Sumastro.

Sebelum memulai acara syukuran, Wali kota berkeliling untuk melihat hasil renovasi ruangan Perumda AMGP kota Singkawang. Beberapa ruangan yang direnovasi diantaranya

apresiasi perhatian dan dukungan Pemerintah kota Singkawang sehingga renovasi ruangan Perumda dapat terealisasi. Ia berharap dengan perwujudan ruangan baru ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan dapat menjawab kebutuhan air bersih bagi masyarakat kota Singkawang.

“Kehadiran Wali Kota Singkawang pada acara syukuran ini memotivasi dan menjadi dorongan kinerja yang lebih baik. Saya berharap dengan adanya perwujudan renovasi ruangan baru

ini dapat memberikan kenyamanan dan layanan yang maksimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.” katanya.

Sementara itu, Wali kota Singkawang, Tjhai Chui Mie berharap dengan adanya perwujudan dan renovasi ruangan baru Perumda AMGP kota Singkawang dapat memacu peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Pada kesempatan ini, Direktur Perumda AMGP kota Singkawang, Suryandi meng-

apresiasi upaya Perumda kota Singkawang yang terus berupaya menjaga kualitas air, cakupan layanan, dan kontinuitas sesuai dengan visi misi bisa dilakukan dengan baik. Selain itu, harapannya masyarakat selaku konsumen bisa taat dan segala bentuk tunggakan terhadap pembayaran penggunaan air yang digunakan dapat segera diselesaikan.” ujarnya.

Ia berharap Perumda AMGP kota Singkawang tetap konsisten untuk menghadirkan air bersih bagi masyarakat kota Singkawang. Sebagai hasilnya, selama satu tahun lebih sudah banyak sumber air yang tadinya keruh menjadi bersih.

“Baginya, ketersediaan air bersih ini menjadi bukti dari kinerja dan kerja keras Perumda AMGP kota Singkawang selama ini,” ujarnya.

Bangun Sinergitas Pemkot dan Kantor Pertanahan Lewat “Coffee Morning”

Pemerintah Kota Singkawang bersama Kantor Pertanahan melaksanakan pertemuan bertajuk “Coffee Morning” di aula kantor Pertanahan Singkawang, Rabu (2/6/2021).

Coffee Morning dihadiri Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, Sekda dan OPD terkait serta Kepala Kantor Pertanahan Singkawang, Marihot Gultom dan jajaran.

Tjhai Chui Mie mengapresiasi kantor Pertanahan Singkawang yang telah menyelesaikan administrasi pertanahan dengan baik. Diantaranya, sertifikat tanah bandara seluas 151,45 Ha, Society of Petroleum Engineer (SPE) dan menyusul pula penyelesaian akan banyaknya Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL)

“Urusan pertanahan yang paling besar adalah sertifikat tanah bandara seluas 151,45 Ha. Kemudian terkait SPE dan banyak hal lainnya yang menyusul untuk diselesaikan. Dan yang saat ini yang tengah menjadi perhatian kami adalah banyaknya HGB di atas HPL. Tentu, kita harapkan kerjasama kantor Pertanahan Singkawang dan kewajibannya bisa terus dilakukan sehingga bisa membantu masyarakat kota Singkawang yang memperpanjang HGB di atas HPL. Dengan seperti ini, administrasi pertanahan akan menjadi tertib dan baik. Laporan keuangan kota Singkawang pun akan menjadi lebih baik lagi,” kata Tjhai Chui Mie.

Ia mengatakan terdapat beberapa hal yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) dan segera akan dilakukan, seperti revitalisasi pasar, angkutan lintas batas negara (ALBN), akses jalan menuju bandar udara kota Singkawang, jalan bypass, dan

lain-lain.

“Hal-hal ini merupakan program-program kedepan yang memerlukan kerjasama dan bantuan dari kantor Pertanahan Singkawang. khususnya hal-hal terkait administrasi sertifikat lahan. Inilah yang menjadi PR yang segera kita lakukan dan kita harapkan pada tahun 2022 sudah terselesaikan dengan baik.” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota memberikan bantuan berupa alat scanner. Pemberian scanner ini dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan bidang pertanahan di Kota Singkawang.

Sementara itu, Kepala kantor Pertanahan Singkawang menyambut baik coffee morning ini sebagai upaya untuk merekatkan hubungan dan sekaligus mengapresiasi bantuan dan dukungan berupa pemberian scanner dari Wali Kota Singkawang. Marihot mengatakan pemberian scanner ini tentunya mendukung pelayanan kantor Pertanahan kota Singkawang ke arah yang lebih baik.

“Dengan pemberian scanner ini, maka pelayanan di kantor pertanahan akan menjadi lebih cepat. Karena di era digitalisasi sekarang ini, semua berkas-berkas layanan harus di-scan. Cukup dengan scanner, masing-masing unit teknis dapat melihat



berkas-berkas tersebut di komputer dan sudah tertata rapi.” ungkapnya.

Ia mengapresiasi perhatian Wali Kota Singkawang yang selalu memberikan arahan dan masukan demi percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang pertanahan di kota Singkawang. Marihot mengatakan melalui arahan dan masukan Wali Kota, masyarakat kota Singkawang dapat merasakan manfaat dan kehadiran kantor pertanahan kota Singkawang.

“Selain mempunyai nilai historis bagi pemiliknya, tanah juga mempunyai nilai ekonomi. Dimana percepatan-percepatan pelayanan sangat berkontribusi langsung terhadap kemajuan perekonomian suatu daerah. Tentunya, hal tersebut yang kita harapkan untuk bisa terjadi di kota Singkawang dimana roda perputaran ekonomi suatu daerah, khususnya di kalangan masyarakat semakin hari semakin baik.” ujarnya. (*)



Pemkot Jalin Kerjasama Pengelolaan Air Minum

dibentuk adalah kerjasama business to business (B2B) dengan Perumda AMGP kota Singkawang yang memerlukan persetujuan dari Pemerintah kota Singkawang terkait Water Treatment Plant SPAM (sistem penyediaan air minum). Dalam hal ini, PT Tigalapan Investama Group siap mendukung tercapainya pelayanan air bersih dengan bersinergi Perumda AMGP kota Singkawang.

dalam menyediakan kebutuhan air bersih bagi masyarakat kota Singkawang,” ujarnya.

Sementara, Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengatakan jika pada musim kemarau kebutuhan air bersih sulit untuk dipenuhi. Maka dari itu, ia berharap melalui kerjasama dengan PT Tigalapan Investama Group dapat membantu menjawab persoalan air tersebut dan meningkatkan penggunaan dan pelayanan air bersih bagi masyarakat kota Singkawang.

“Saat ini, terhitung pengguna air bersih di kota Singkawang baru mencapai kira-kira 3.000 pelanggan. Maka, diharapkan akhir 2021, terjadi peningkatan pelanggan sebanyak 20.000 pelanggan. Oleh sebab itu, perlu ada tindak lanjut untuk mengeksekusi kerjasama antara PT Tigalapan Investama Group dengan Perumda AMGP kota Singkawang,” ujar Tjhai Chui Mie.

Ia mengatakan melalui kerjasama ini yang menjadi sasaran utama untuk saat ini adalah menunjang penyediaan air bersih untuk Sekolah Polisi Negara (SPN) kota Singkawang dan Bandar Udara Kota Singkawang.

“Jadi nanti akan dibangun intake di danau Serantangan, Singkawang Selatan. Tadi dikatakan oleh pihak PT Tigalapan Investama Group, mereka sudah meninjau lokasi di dua tempat yaitu Danau Serantangan, Singkawang Selatan dan di daerah Semelagi, Singkawang Utara. Karena bicara tentang pembangunan bandara, tentunya dibutuhkan ketersediaan air bersih. Maka dari itu, kerjasama ini adalah upaya kita bersama untuk mencapai tujuan yang diharapkan,” ujarnya. (*)

Pemerintah Kota Singkawang bersama PT Tigalapan Investama Group melakukan Penandatanganan kesepakatan bersama di ruang rapat Wali Kota Singkawang, Kamis (3/6/2021). Hal yang disepakati kedua belah pihak adalah tentang investasi dan pengelolaan sistem penyediaan air minum serta sarana penunjang lainnya di wilayah kota Singkawang.

Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Air memiliki peran penting dan fungsi pada keperluan industri, pertanian, transportasi dan lain sebagainya.

Direktur Utama PT Tigalapan Investama Group, Titi Khoriah menyatakan bahwa kebutuhan masyarakat akan air perlu didukung secara maksimal. Titi juga mengatakan akan mendukung kinerja Perumda Air Minum Gunung Poteng (AMGP) untuk memberikan pelayanan penyediaan air bersih bagi masyarakat kota Singkawang.

Ia menjelaskan kerjasama yang

ya pelayanan air bersih dengan bersinergi Perumda AMGP kota Singkawang.

“Tentunya, dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, APBD suatu daerah mengalami refocusing, sehingga harus membangun kerjasama dengan badan usaha. Fokus dukungan kami berupa instalasi pengolahan air (intake), instalasi jaringan distribusi, dan instalasi transmisi. Kami akan support secara teknologi dan pendanaan guna mendukung cakupan pelayanan air bersih ke seluruh masyarakat,” katanya.

Titi berharap kerjasama PT Tigalapan Investama Group dengan Perumda AMGP kota Singkawang dapat memberikan kontribusi dalam hal pembangunan infrastruktur industri Water Treatment Plant. Titi menjabarkan tiga hal penting dalam penyediaan sistem air minum, yaitu kontinuitas ketersediaan air, dan kualitas.

“Jadinya, pada saat musim kemarau, tidak ada lagi permasalahan yang timbul akibat kekurangan air. Maka dari itu, kami menjalin kerjasama ini sebagai bentuk kontribusi kami

Kembalikan Fungsinya, Pemkot Revitalisasi Terminal Pasiran



Pemerintah Kota Singkawang berencana melakukan revitalisasi Terminal Pasiran untuk mengembalikan fungsinya agar tertata dengan baik.

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengungkapkan kerinduannya agar terminal pasiran berfungsi sebagaimana mestinya dan lebih tertata baik melalui revitalisasi.

Ia mengungkapkan beberapa hal yang akan dilakukan untuk menata dan memfungsikan kembali Terminal Pasiran, seperti pembangunan WC umum yang bersih dan layak pakai, posko, penataan tanaman, dan lain-lain.

“Secara bertahap, Pemerintah kota Singkawang akan menata dan mengembalikan fungsi dari pembangunan Terminal Pasiran ini. Perlahan-lahan, yang akan ditata seperti WC, posko, tanaman, dan lain-lain. Tentunya, kami berharap melalui perencanaan ini Terminal Pasiran bisa kembali berfungsi.” Ungkap Tjhai Chui Mie, Kamis (3/6/2021).

Tjhai Chui Mie menjelaskan, sebagai langkah awal revitalisasi Terminal Pasiran,

nantinya akan memperjelas struktur organisasi yang dibentuk dan bersentuhan langsung dengan fungsi Terminal. Kemudian, akan dilakukan pendataan terhadap angkutan umum dan angkutan pariwisata yang akan ditempatkan di Terminal Pasiran.

“Melalui pendataan yang baik, maka akan diketahui jumlah keluar masuk angkutan perharinya di Terminal Pasiran ini. Tentunya, akan dikenakan retribusi sehingga pendapatan asli daerah (PAD) didapat dan juga terkontrol dengan baik. Organisasi angkatan darat (Organda) juga bisa melakukan fungsinya untuk menata rapi semua angkutan berdasarkan tujuan destinasinya.” jelasnya

Sebagai kota wisata, Pemerintah Kota Singkawang akan menempatkan bus medium milik DAMRI dan oplet untuk pariwisata pada Terminal Pasiran ini juga.

“Oplet untuk pariwisata kota Singkawang juga akan ditempatkan di Terminal Pasiran ini. Sehingga, masyarakat bisa dengan mudah mengunjungi tempat-tempat wisata, seperti pantai, taman, dan lain-lain. Tentunya, ini adalah kabar yang sangat baik bagi para wisatawan dan khususnya penduduk kota Singkawang juga yang berprofesi sebagai pelaku usaha. Jadi, kita akan tempatkan angkutan itu di sini, begitu pula halnya dengan bus medium milik DAMRI.” ujarnya.

Sementara, Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang, Petrus Yudha Sasmita menjelaskan bahwa Terminal merupakan titik simpul dari berbagai sarana (moda) angkutan yang berfungsi sebagai transfer point penumpang dari suatu sarana angkutan ke sarana angkutan lainnya.

Terminal juga, kata Yudha sebagai

tempat pengaturan dan pergerakan kendaraan maupun penumpang.

Maka dari itu, Yudha beserta jajarannya berupaya melakukan pengembalian fungsi Terminal Pasiran kota Singkawang dalam upaya peningkatan prasarana transportasi jalan di kota Singkawang.

Ia menekankan bahwa terminal merupakan salah satu bagian fasilitas di kota Singkawang yang harus dijaga dan dikelola sesuai dengan ketentuan.

- Penertiban PKL di Terminal Pasiran

Sejalan dengan rencana revitalisasi Terminal Pasiran, Pemerintah Kota Singkawang akan melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang ada di lingkungan Terminal Pasiran.

“Selama ini, ada aduan bahwa pada malam hari terdengar kebisingan yang meresahkan dan mengganggu ketenangan masyarakat sekitar. Maka dari itu, PKL ini akan kita tertibkan dan Terminal Pasiran akan dibaguskan kembali.” kata Wali Kota Tjhai Chui Mie.

Untuk melakukan penertiban PKL di Terminal Pasiran kota Singkawang, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, baru kemudian akan diambil langkah lebih lanjut.

“Terhadap PKL di Terminal Pasiran, melalui Dinas Perdagangan kota Singkawang, kami akan mendata terlebih dahulu PKL yang ada sebelum mengambil langkah selanjutnya. Para PKL yang ada di sini juga harus bersiap-siap untuk tidak berjualan di sini, jika nantinya diminta untuk pindah atau menempati lokasi lainnya.” ungkapnya. (*)



WALI KOTA SINGKAWANG KOMIT DUKUNG TP2DD

Wali Kota Singkawang berkomitmen mendukung Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) seperti yang telah diinisiasi oleh Bank Indonesia. Hal ini disampaikan sesuai mengikuti kegiatan yang digelar oleh Bank Indonesia di Pendopo Gubernur Kalbar.

Sebelumnya, Bank Indonesia telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di 14 kabupaten kota dan Provinsi Kalbar.

Kegiatan ini masuk dalam rangkaian acara Saprahan Khatulistiwa 2021, semarak Pariwisata, UMKM dan Keuangan Khatulistiwa yang digelar oleh Bank Indonesia di Pendopo Gubernur Kalbar, Senin (7/6/2021).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki secara virtual

dan Gubernur H.Sutarmidji secara langsung di Pendopo Kalbar.

Kepala Bank Indonesia Agus Chusaini mengatakan bahwa kegiatan Saprahan Khatulistiwa 2021, semarak Pariwisata, UMKM dan Keuangan Khatulistiwa adalah kolaborasi BI bersama Pemda, Pelaku Usaha, Pelaku Industri Keuangan dan pihak terkait.

“Melalui kegiatan sebagai upaya kita terus mendorong UMKM dan Pariwisata agar bisa tumbuh lebih cepat ditengah pandemi Covid-19,” jelasnya.

Dikatakannya ditengah pandemi Covid-19 sektor yang paling berdampak adalah pariwisata dan UMKM.

“Inilah yang terus didorong untuk bangkit untuk bisa meningkatkan perkonomi-

Disampainya bahwa Gubernur H. Sutarmidji juga sejalan mendorong dari sisi konsumsi pemerintah, tapi kalau untuk konsumsi swasta bentuknya urgent melihat situasi kalau tidak maka tidak melakukan investasi.

“Kita berupaya melalui giat ini mendorong UMKM dan pariwisata di Kalbar. Paling tidak sekarang kita siapkan dulu prasarana dan infrastruktur serta SDM nya. Ketika situasi pulih pariwisata bisa mulai bergerak,” jelasnya.

Kepala BI juga berpesan kepada masyarakat untuk tetap menjaga prokes agar perekonomian terus bergerak. Namun apabila prokes tidak dijalankan, maka akan berat.

“Jadi disini peran masyarakat juga diperlukan untuk menjaga penyebaran covid-19 agar bisa dikendalikan,” ucapnya. (*)



IRWAN SAMPAIKAN JAWABAN ATAS PU FRAKSI DPRD SINGKAWANG

“Tentunya, hal terkait raperda tersebut diharapkan dapat dibicarakan lebih lanjut pada saat pembahasan antara tim eksekutif dan pansus DPRD kota Singkawang. Ataupun juga pada rapat-rapat kerja lainnya antara DPRD dengan perangkat daerah terkait.” Kata Irwan.

Irwan juga menyampaikan pandangan umum lainnya di luar pembahasan materi 3 raperda, yaitu pembangunan bandara udara Singkawang, revitalisasi Terminal Pasiran, pelayanan Penerangan Jalan Umum (PJU), jam operasional kendaraan angkutan berdimensi besar, pelayanan perizinan penerbitan IMB, pengurangan anggaran bantuan hibah pada APBD 2021, bantuan pasien terkonfirmasi COVID-19 serta upaya pencegahan dan penanganan dampak pandemi COVID-19 di kota Singkawang.

Irwan mengapresiasi atas masukan dan saran yang diberikan oleh seluruh fraksi-fraksi DPRD kota Singkawang.

“Mohon maaf, apabila ada jawaban yang belum memenuhi harapan. Selain itu, saya juga mengucapkan terimakasih atas saran dan masukan yang selama ini diberikan oleh seluruh fraksi-fraksi DPRD kota Singkawang. Semoga pembahasan Raperda ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan.” Ujarnya.



Wakil Wali Kota Singkawang, Irwan menghadiri Rapat Paripurna di Aula DPRD kota Singkawang, Rabu (9/6/2021). Irwan menjelaskan pada rapat paripurna ini dengan agenda jawaban Wali Kota atas Pandangan Umum Fraksi DPRD berkenaan dengan raperda yang disusun, yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan penyertaan modal Pemerintah kota Singkawang pada Perumda Air Minum Gunung Poteng tahun 2021-2024.

Irwan berharap agar segera dibentuk tim panitia khusus DPRD kota Singkawang dan Pemerintah kota Singkawang untuk membahas rancangan perencanaan daerah (raperda) kota Singkawang lebih lanjut sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.



Pengadilan Negeri Singkawang untuk pertama kalinya menggelar sidang perdana yang merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan implementasi layanan inovasi "Sayap Emas".

Dalam kesempatan itu dilaksanakan open table pendaftaran perkara khusus perkara permohonan (voluntair). Misalnya untuk permohonan perubahan nama, pengangkatan wali, pengangkatan anak, dan lain sebagainya.

Ketua Pengadilan Negeri Singkawang, Hasanudin mengatakan sebelumnya Pengadilan Negeri Singkawang telah melakukan sosialisasi kepada ketua-ketua RT se-Kelurahan Pasiran. Dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan kepada masyarakat, Pengadilan Negeri Singkawang menyediakan kendaraan operasional yang digunakan untuk

PENGADILAN NEGERI SINGKAWANG GAGAS "SAYAP EMAS"

Pengadilan Negeri Singkawang menyediakan kendaraan operasional yang digunakan untuk penjemputan kepada pihak berperkara yang akan bersidang.

"Inovasi Sayap Emas ini murni gagasan Pengadilan Negeri Singkawang dan merupakan yang pertama di Indonesia," ujar Hasanudin, Senin (14/6/2021).

Layanan Sayap Emas untuk pertama kalinya merupakan layanan goes to customer khusus perkara permohonan (voluntair). Hal ini karena perkara permohonan saat ini paling banyak dan dibutuhkan oleh masyarakat Kota Singkawang.

"Layanan Sayap Emas ini akan rutin kami laksanakan di Kelurahan yang berbeda-beda. Berdasarkan jadwal yang telah kami susun, Jumat depan (18/6/2021) akan dilaksanakan open table pendaftaran di Kelurahan Roban. Kepada Masyarakat Kota Singkawang bisa mendatangi Kelurahan Roban jika ingin mendaftarkan atau jika ingin mencari informasi apapun tentang layanan Pengadilan," lanjut Hasanudin.

Ia berharap dengan adanya layanan Sayap Emas ini, maka masyarakat tidak perlu

mendaftarkan permohonannya di pengadilan.

Sebelumnya pada Jumat (11/6/2021) sidang dimulai sejak pukul 09:00 WIB, bertindak sebagai Hakim adalah Bapak Satriadi, S.H., didampingi oleh Bapak Adie Tirta, S.H. sebagai Panitera Pengganti. Pada kegiatan hari ini dapat menyelesaikan sebanyak 3 (tiga) persidangan masing-masing dengan nomor perkara 77/Pdt.P/2021/PN Skw, 79/Pdt.P/2021/PN Skw dan 83/Pdt.P/2021/PN Skw dengan jenis perkara Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran. Salinan putusan persidangan pada hari ini juga langsung diserahkan kepada masing-masing Pemohon (Same Day Service).

"Saya sangat berterima kasih kepada Pengadilan Negeri Singkawang atas pelayanan Sayap Emas ini, sehingga masyarakat Kota Singkawang bisa mendapat layanan terbaik dan tanpa dipungut biaya," ujar Tjong Li Tju, salah satu Pemohon yang bersidang pada hari itu.

Sementara, Kepala Bagian Hukum Setda Kota Singkawang, Rully Amri mengatakan Pemerintah Kota Singkawang menyambut baik inovasi ini, yang artinya program sayap emas ini memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh layanan hukum yang bersifat litigasi.

"ini patut kita apresiasi," kata Rully. Ia berharap program ini dapat bersinergi dengan program yang ada di bagian hukum. "Semoga kedepannya program Sayap Emas dapat bersinergi dengan program di bagian hukum," ujarnya. (*)

SAKIP Singkawang Berjalan Baik

Inspektorat Kota Singkawang memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan Zona Integritas kota Singkawang di ruang rapat Wali Kota Singkawang, Senin (14/6/2021). kegiatan ini juga diikuti secara virtual dengan menggunakan metode desk evaluation melalui aplikasi zoom cloud meeting.

Menurut Inspektur Kota Singkawang, Siti Kodam Mariana, setiap kinerja yang dilakukan perangkat daerah harus dilaporkan. Hal ini menjadi pertanggungjawaban dalam rangka mencapai sasaran program kegiatan yang menyesuaikan APBD kota Singkawang.

"Untuk mencapai visi-misi kota Singkawang, program-programnya harus sejalan. Tentu dalam hal ini, bukan sekedar membelanjakan habis APBD, tapi harus ada output dan outcome yang mencapai sasaran," katanya.

Ia berharap agar komitmen dalam melaksanakan program-program yang sejalan dengan visi-misi tetap terjaga. Hal ini dimaksudkan agar terwujud suatu kesatuan dan kerjasama seluruh perangkat daerah yang mengarah pada visi-misi Wali Kota Singkawang.

"Kita harus terus evaluasi secara berkala terkait program-program yang direncanakan. Kita lihat kembali pelaksanaan programnya tercapai atau tidak. Jika belum tercapai atau belum efektif, bagaimana tindak lanjut agar selaras dengan visi misi. Maka dari itu, setiap perangkat daerah harus punya komitmen yang sama dan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri untuk mencapai tujuan," harapnya.

Dari segi penilaian, Ia menilai SAKIP pemerintah kota Singkawang sudah berjalan dengan baik.

Sementara, Wali Kota Singkawang

Tjhai Chui Mie mengapresiasi kinerja perangkat daerah meski ditemui 17 perangkat daerah yang dinilai perlu meningkatkan kualitas kerjanya.

"Perencanaan dan kinerja Pemerintah yang baik, tentu masyarakat juga lah yang akan merasakan dampaknya. Dengan adanya evaluasi ini, beberapa perangkat daerah yang dinilai perlu meningkatkan kualitas kerjanya." Ujarnya.

Untuk memotivasi perangkat daerah kota Singkawang, Ia menyatakan akan menerapkan sistem Reward dan punishment. Reward dan Punishment adalah dua bentuk metode dalam memotivasi petugas layanan publik untuk melakukan memberikan pelayanan prima dan meningkatkan prestasinya. Pemberian Reward dan Punishment sesuai dengan mekanisme reformasi birokrasi di Kementerian/Lembaga Pemerintahan.

"Tadi sudah saya sampaikan setiap perangkat daerah perlu melaksanakan rapat internal untuk mengawal dan memantau terlaksananya program-program di dinas masing-masing. Tidak harus rapat formal, bisa saja sambil ditemani minum kopi sambil bertukar informasi dan masukan. Dari notulen, kita pantau terus setiap poinnya dan bisa diketahui cara mengatasi kendala yang ada." Katanya.

Tjhai Chui Mie berharap setiap perangkat daerah untuk mencintai pekerjaannya agar dapat mewujudkan inovasi yang diharapkan. Ia mengatakan perangkat daerah dapat mengadopsi inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Hal ini dimaksudkan agar perangkat daerah dapat memberikan layanan



kepada masyarakat yang lebih optimal.

"Bertanggungjawab, mencintai pekerjaan dan ikhlas adalah hal-hal yang dapat mendorong terwujudnya inovasi. Inovasi tiap perangkat daerah pun beragam. Misalnya dinas Kominfo dapat menyuguhkan pemberitaan dengan gaya-gaya yang menarik. Tidak hanya monoton dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk video, gambar atau meme. Kita bisa mengadopsi inovasi pelayanan publik di perusahaan-perusahaan." Ujarnya.

Dalam kaitannya dengan inovasi, Tjhai Chui Mie menilai sebagian perangkat daerah yang sudah mulai menerapkan perwujudan konsep Smart City. Konsep Smart City ini juga memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan yang lebih baik.

"Nantinya, kita akan ciptakan konsep Smart City dan diharapkan sudah bisa bergerak mengikuti kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Contohnya, jika masyarakat ingin mengetahui informasi terkait wisata, makanan khas suatu daerah, jajanan atau oleh-oleh dengan mudah bisa didapatkan. Selain itu, fungsinya adalah dengan melawan hoaks dan mendapat berita terkait kondisi di lapangan dari masyarakat. Perlahan-lahan pasti akan kita kerjakan." Ujarnya. (*)

Kampung Bahari Nusantara Dicanangkan di Batu Burung



Batu Burung Singkawang dicanangkan sebagai Kampung Bahari Nusantara, Selasa (15/6/2021). Pantai Batu Burung merupakan salah satu wilayah LANTAMAL XII Pontianak yang termasuk dalam program Kampung Bahari Nusantara. Kampung Bahari Nusantara merupakan salah satu program kegiatan TNI Angkatan Laut (AL) yang rutin setiap tahun dilaksanakan secara serentak dari Sabang sampai Merauke.

Komandan Lantamal XII Pontianak, Brigjen TNI (Mar) Andi Rukman mengatakan pembangunan ini merupakan salah satu perwujudan tugas TNI AL untuk membantu pemerintah daerah menciptakan masyarakat maritim peduli dengan kelestarian laut di daerahnya.

Danlantama memaparkan lima klaster utama dalam pencanangan program Kampung Bahari Nusantara, yaitu klaster pertahanan, edukasi, ekonomi, kesehatan dan pariwisata. Ia berharap Kampung Bahari Pantai Batu Burung ini memberi manfaat bagi masyarakat kota Singkawang.

“Semoga program dan kegiatan ini dapat terus berlanjut dengan dukungan serta kontribusi positif dari semua pihak. Baik partisipasi dari Pemerintah kota Singkawang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, maupun seluruh tokoh masyarakat kota Singkawang.” Kata Danlantamal.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan dengan program Kampung Bahari Nusantara ini sejalan dengan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yaitu mewujudkan desa

mandiri.

Ria Norsan mengatakan saat ini terdapat 385 desa mandiri di Kalimantan Barat.

“Dengan adanya program Kampung Bahari Nusantara ini, tentunya mendukung terwujudnya program desa mandiri. Mudah-mudahan, hasil dari kegiatan hari ini bisa dipelihara dan ditingkatkan. Nanti, saya akan menghubungi pemerintahan desa, dinas perikanan dan dinas pariwisata supaya program Kampung Bahari Nusantara Pantai Batu Burung bisa cepat terwujud.” Kata Ria Norsan.

Sementara, Wakil Wali kota Singkawang Irwan menyambut baik pencanangan program Kampung Bahari Nusantara di Pantai Batu Burung yang diinisiasi oleh LANTAMAL XII Pontianak.

“Tentunya, Pemerintah kota Singkawang mendukung program Kampung Bahari Nusantara ini. Inilah contoh sebuah pembangunan yang ideal, dimana kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pihak swasta dan media massa. Mari kita sambut dengan baik program ini dengan menjaga dan melestarikan Kampung Bahari Nusantara ini.” kata Irwan.

Irwan mengatakan program pencanangan Kampung Bahari Nusantara Pantai Batu Burung ini menambah daya tarik wisata dan bernilai ekonomi.

“Selain menambah daya tarik wisata, tidak menutup kemungkinan, program ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Tentunya, dengan adanya investasi-investasi pembangunan lokasi penginapan di wilayah ini.” ujarnya. (*)

Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kota Singkawang menggelar rapat koordinasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di ruang rapat Bumi Betuah kantor Wali Kota Singkawang, Rabu (16/6/2021).

Praktek perdagangan orang merupakan salah satu permasalahan yang hingga kini masih menjadi momok di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan UU no 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Undang-undang tersebut mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan perdagangan orang dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.

Praktek perdagangan orang yang kerap ditemui diantaranya pekerja kasar (trafficking for labor), pekerja seks (trafficking for prostitution), jual beli organ tubuh (trafficking for organ trade), eksploitasi anak (child trafficking), dan pengantin pesanan (forced marriage).

Direktur Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Perempuan dan Keluarga (LKBH PeKa) Kalimantan Barat, Rosita Nengsih mengatakan motif terjadinya praktek perdagangan orang disebabkan oleh banyak faktor. Diantaranya seperti latar belakang pendidikan yang rendah, permasalahan ekonomi rumah tangga, dan budaya yang menjamur di suatu daerah.

“Maraknya kasus ini, berawal dari korban yang melihat tetangganya menjadi kaya karena mengikuti praktek perdagangan orang melalui pengantin



Singkawang Gelar Rakor TPPO

pesanan. Akhirnya, mereka pun menjadi ikut-ikutan. Memang pesanan dari luar negeri untuk amoi kota Singkawang ini luar biasa peminatnya.” Kata Rosita Nengsih.

Ia mengungkapkan oknum-oknum yang menjadi pelanggan adalah serdadu-serdadu veteran negeri tetangga dan organisasi hiburan malam. Sementara itu, korban-korban perdagangan orang yang ditangani dan didampingi LKBH PeKa Kalimantan Barat adalah berdasarkan laporan terkait korban yang bermasalah.

“Pada awalnya, di tahun 80-an negara yang memesan adalah Taiwan, kemudian terjadi pergeseran peminat hingga ke hongkong dan RRC. Umumnya, peminatnya itu serdadu yang sudah berumur dan jaringan hiburan malam. Kalau perempuan yang dipesan ya biasanya untuk pengantin pesanan. Kalau laki-laki yang dipesan, biasanya

untuk pekerja kasar.” Katanya.

Sementara, Plt Kepala Dinas Sosial, PP dan PA kota Singkawang Bosni mengatakan apabila ditemui dan diketahui terdapat praktek perdagangan orang, masyarakat dapat melaporkan langsung ke Dinas Sosial dan PPPA kota Singkawang, Polres kota Singkawang, dan LKBH PeKa Kalimantan Barat.

“Apabila masyarakat menemui dan mengetahui adanya praktek perdagangan orang dapat dilaporkan langsung ke Dinas Sosial dan PPPA kota Singkawang, Polres kota Singkawang, dan LKBH PeKa Kalimantan Barat.” Katanya.

Bosni menambahkan korban-korban perdagangan orang di kota Singkawang akan diberikan perlindungan dan pendampingan lebih lanjut. Bosni mengatakan sebagai bentuk tindak pencegahan dan penanganan perdagangan orang di Kota Singkawang dengan melakukan sosialisasi tentang tindak pidana perdagangan orang hingga ke tingkat bawah, yang nantinya akan dimulai dari Kecamatan, Kelurahan, dan RT setempat.

“Melalui dinas sosial, kami akan melakukan sosialisasi tentang tindak pidana perdagangan orang kepada RT, Kelurahan, dan Kecamatan kota Singkawang. Sehingga, masyarakat yang teredukasi pun bisa melihat adanya indikasi-indikasi yang mengarah pada praktek perdagangan orang di kota Singkawang.” ujarnya. (*)

Satgas Covid-19 Kota Singkawang segera mengambil langkah guna menyikapi meningkatnya angka terkonfirmasi Covid-19 di Kota Singkawang pasca lebaran Idul Fitri.

“Telah kita sepakati beberapa langkah yang akan kita ambil seperti, memperketat pemberlakuan PPKM berbasis mikro di setiap RT berdasarkan zona di masing-masing RT,” kata Wali Kota Singkawang selaku Ketua Satgas Covid-19 Singkawang, Tjhai Chui Mie, Senin (7/6/2021).

Khusus RT yang masuk kategori zona merah, akan pihaknya rapatkan kembali bersama Satgas Covid-19 Kota Singkawang terkait dengan apa-apa saja yang sudah dilakukan maupun yang akan dilakukan.

Selain itu, Pemkot Singkawang juga akan menyiapkan tempat karantina terpusat serta mempersiapkan tabung oksigen, obat-obatan, reagen dan sebagainya di rumah sakit.

Kepada masyarakat Kota Singkawang, tolong taati dan disiplin terhadap protokol kesehatan. Sehingga wabah virus Covid-19 bisa diminimalisir dan dihindari. Dengan begitu, masyarakat Kota Singkawang bisa beraktivitas kembali.

Khusus di Kota Singkawang, kata Tjhai Chui Mie, dari lima kecamatan terdapat empat kecamatan yang mana terdapat lingkungan RT nya masuk kategori zona merah.

“Kecuali Kecamatan Singkawang Timur dinilai lebih sedikit zona merahnya,” ujarnya.

Apabila tempat karantina terpusat sudah siap, Tjhai Chui Mie berharap agar

masyarakat yang terpapar bisa menempatinya selama proses karantina berlangsung. Hal itu disarankan dia, mengingat sampai Jumat (4/6) kemarin, ruang isolasi di RSUD Abdul Aziz Singkawang sudah hampir terisi penuh.

“Rencananya Gedung BLKI akan kita fungsikan lagi untuk tempat karantina mandiri secara terpusat. Selain lengkap dengan obat-obatan, gedung ini juga bisa menampung sebanyak 40 orang,” ungkapnya.

Menurutnya, karantina mandiri di rumah bisa saja diizinkan sepanjang rumah yang bersangkutan memadai.

“Misalkan di dalam kamar ada WC/kamar mandinya. Sehingga orang yang terpapar tersebut tidak keluar dan tidak menularkan lagi kepada keluarga yang ada rumah,” ungkapnya.

Direktur RSUD Abdul Aziz Singkawang, Ruchanihadi mengatakan, sampai hari ini ada 26 pasien yang dirawat di ruang Isolasi RSUD Abdul Aziz



Empat RT Masuk Daerah Merah, PPKM Mikro Diperketat

Singkawang.

“Puluhan orang yang dirawat kondisinya tetap stabil, meski sebelumnya pasien sempat mengalami sesak nafas, batuk dan demam,” katanya.

RSUD Abdul Aziz Singkawang, katanya, setiap hari akan melakukan evaluasi pasien di ruang isolasi.

“Evaluasi yang dilakukan guna memastikan apakah ada pasien yang sudah bisa keluar atau sudah bisa menjalani rawat jalan, yang tentunya hal tersebut akan kita informasikan secepatnya agar bisa menampung pasien baru yang terkonfirmasi maupun suspek,” ujarnya. (*)

Tentunya, kata dr Yuliani, memang dalam beberapa kejadian, seseorang yang sudah divaksinasi masih terpapar virus Covid-19. Hal ini menurutnya terjadi karena efektivitas vaksin yang hanya 65 persen, sehingga seseorang masih dapat terpapar.

Namun, dengan divaksinasi tubuh, maka tubuh akan mampu melawan virus yang berada didalam tubuh sehingga dampak dari terpapar Covid-19 tidak akan lebih parah daripada yang tidak divaksinasi.

“Seperti saya, yang pasti kalau sudah divaksin, paling tidak kalau terinfeksi virus tidak jatuh ke status parah. Pastinya juga protokol kesehatan juga tetap dijalankan,” ujarnya. (*)

asi, antaranya adalah pelayanan publik, tenaga kesehatan (Nakes) dan masyarakat lanjut usia (Lansia),” kata dr. Yuliani, Rabu (9/6/2021).

Untuk pelayanan publik, sudah sebanyak 8.018 orang sudah divaksinasi atau sekitar 65,35 persen. Sementara untuk Nakes, seluruhnya berjumlah 2.566 sudah divaksinasi atau 118,8 persen.

“Sedangkan untuk lansia, baru sebanyak 1.820 orang atau hanya 8,6 persen yang sudah divaksinasi,” ujarnya.

Menurutnya beberapa kendala dialami petugas dalam pelaksanaan vaksinasi khususnya kepada kaum Lansia.

Diantaranya, mulai dari kesulitan mencari sasaran lansia, hingga ketersediaan vaksin yang didistribusikan oleh pusat menjadi kendala utama.

“Karena banyak Lansia yang masih belum mau. Padahal kelompok ini merupakan kelompok yang rentan terhadap penularan Covid-19,” katanya.

Saat ini, seluruh stake holder terkait tengah berupaya untuk mempercepat proses pelaksanaan vaksinasi di Kota Singkawang, salah satunya dengan mencari inovasi untuk pencapaian target vaksinasi lansia.



KETERSEDIAAN VAKSIN DI SINGKAWANG SEDIKIT

Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Kesehatan dan KB mendukung percepatan vaksinasi untuk membentuk konsep hard imunity.

Namun, pelaksanaan vaksinasi yang saat ini diupayakan Pemkot Singkawang melalui Dinas Kesehatan masih belum mampu menjangkau seluruh masyarakat.

Kepala Bidang P2 Dinas Kesehatan dan KB Kota Singkawang, dr Yuliani mengatakan ketersediaan vaksin yang jumlahnya sedikit menjadi kendala utama, sehingga vaksinasi hanya diberikan kepada sasaran yang merupakan prioritas vaksinasi.

“Tiga kelompok prioritas vaksi-

AKM II Itwasda Polda Kalbar, Kombes Pol Raden Petit Wijaya melakukan supervisi terkait percepatan penanganan COVID-19 di kota Singkawang, Senin (14/6/2021).

“Sesuai dengan perintah dari Kapolda Kalbar, saya berkunjung untuk melihat sejauh mana penanganan COVID-19 di Kota Singkawang. Yang diantaranya itu adalah penerapan PPKM Mikro, protokol kesehatan 5M dan upaya 3T di Kota Singkawang,” kata Raden Petit.

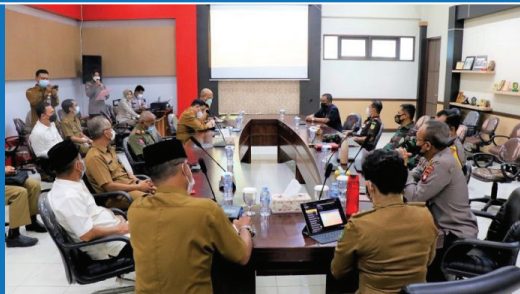
Pada pertemuan ini, Raden Petit mendengarkan pemaparan penanganan percepatan COVID-19 oleh Satgas COVID-19 Kota Singkawang, diantaranya kepala Dinas Kesehatan, kepala Dinas Kominfo, Kepala Satpol-PP kota Singkawang.

Setelah mendengarkan pemaparan, Raden Petit pun memberikan tanggapan dan arahan kepada kepala dinas terkait yang juga tergabung dalam Satgas COVID-19 kota Singkawang.

“Alhamdulillah, sudah terlaksana dengan baik. Karena kegiatan hari ini adalah rapat koordinasi, maka ada beberapa masukan-masukan yang diberikan dalam upaya peningkatan penanganan COVID-19 yang lebih optimal.” ujarnya.

Ia menjabarkan masukan yang diberikan kepada dinas terkait, yaitu pengedukasian COVID-19 dan penerapan serta penanganannya di masyarakat, baik perseorangan maupun pelaku usaha.

“Apabila ditemukan ketidakpatuhan terhadap protokol kesehatan dan peraturan daerah yang berlaku, maka akan diambil tindakan, baik itu teguran ataupun tindakan tegas yang humanis. Tentunya, kita tidak mau mematikan usaha yang mendorong perekonomian daerah karena kita tahu masyarakat juga



Polda Kalbar Supervisi Penanganan Covid-19 di Singkawang

butuh bekerja dan berprestasi. Maka, kami saat ini berdiskusi mencari cara yang tepat untuk mengedukasi dan membangun kesadaran masyarakat.” Katanya.

Sementara Wali kota Singkawang sekaligus Ketua Satgas COVID-19 kota Singkawang, Tjhai Chui Mie menyambut baik kunjungan Kombes Pol Raden Petit yang meninjau dan memberikan masukan terkait percepatan penanganan COVID-19 di kota Singkawang. Tjhai Chui Mie menyatakan bahwa saat ini Singkawang berada di zona kuning dan dari data yang terkumpul tren penyebaran COVID-19 di kota Singkawang cukup tinggi.

Tjhai Chui Mie menyampaikan berita yang membawa angin segar bahwa kota Singkawang akan diberikan bantuan vaksin dari Mabes Polri. Tjhai Chui Mie berharap percepatan penanganan COVID-19 di kota Singkawang segera terselesaikan dengan adanya vaksinasi.

Ia pun meminta kepada dinas terkait selaku Satgas COVID-19 untuk mendata ASN, pelaku usaha, lansia, dan komunitas-komunitas atau perkumpulan-perkumpulan tertentu yang belum divaksin.

Ia pun meminta kepada dinas terkait selaku Satgas COVID-19 untuk mendata ASN, pelaku usaha, lansia, dan komunitas-komunitas atau perkumpulan-perkumpulan tertentu yang belum divaksin.

“Kami juga akan mendorong percepatan vaksinasi yang dilakukan secara pribadi oleh pihak-pihak tertentu. Jika cakupan vaksinasi sudah menyeluruh, tentu akan sangat terbantu untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di kota Singkawang. Nantinya, akan ada sekitar 4.000 vial yang kita dapatkan dan sekitar 20.000 target sasaran penerima vaksinasi. Kalau 1 hari bisa menjangkau 600 orang berarti sekitar 2 bulan sudah terlaksana untuk keperluan vaksin.” ujarnya.

Ia mengimbau kepada para pelaku usaha yang terkonfirmasi untuk tidak berjualan dan melakukan isolasi mandiri ataupun segera berobat ke rumah sakit rujukan COVID-19. Tjhai Chui Mie menyatakan akan mengugaskan satgas COVID-19 kota Singkawang untuk mendata masyarakat yang berstatus kepala keluarga dan pekerja harian untuk diberikan bantuan sembako selama masa karantina.

“Wajib hukumnya, pelaku usaha yang terkonfirmasi untuk tidak berjualan di pasar supaya tidak terjadi penyebaran COVID-19 kepada yang pengunjung atau pelaku usaha lainnya. Langsung melakukan isolasi mandiri ataupun segera berobat ke rumah sakit rujukan COVID-19 untuk mendapatkan penanganan. Kami akan mendata dan mengusahakan supaya masyarakat yang merupakan kepala keluarga yang berpenghasilan harian untuk mendapat bantuan sembako dan suplemen selama masa karantina. Apabila anggota keluarganya yang terkonfirmasi, akan diberikan suplemen dan vitamin saja, karena kepala keluarga masih bisa bekerja.” ujarnya. (*)



Pangdam XII Tpr Tinjau Serbuan Vaksin di Singkawang

Pangdam XII Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad meninjau langsung pelaksanaan serbuan vaksinasi Covid-19 di Singkawang Grand Mall, Senin (21/6/2021). Turut hadir dalam peninjauan Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie beserta Forkopimda Kota Singkawang

Pangdam mengungkapkan, program serbuan vaksin Covid-19 dari Kodam XII Tanjungpura ini digelar dalam rangka mendukung Satgas Covid-19 Nasional dan Satgas Covid-19 Kalbar dalam menangani pandemi Covid-19.

Pangdam melihat antusiasme masyarakat kota Singkawang sangat baik dalam mengikuti program pelaksanaan

vaksinasi Covid-19 ini. Pangdam berharap dengan pelaksanaan vaksinasi ini dapat memberi perlindungan diri yang baik terhadap paparan Covid-19.

“Kami TNI/Polri bersama dengan Pemerintah Daerah bahu-membahu untuk melaksanakan secara

serentak serbuan vaksinasi ini. Kami menargetkan semua kelompok masyarakat yang akan divaksin. Kalau dulu diprioritaskan kepada lansia saja, sekarang kita menjangkau semua warga masyarakat yang sering berinteraksi satu sama lain. Sehingga, bisa memaksimalkan perlindungan bagi masyarakat kota Singkawang.” ujar Pangdam.

Di hari yang sama, Wali Kota Tjhai Chui Mie beserta Forkopimda juga meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Paviliun. Tjhai Chui Mie mengapresiasi antusias masyarakat kota Singkawang yang mengikuti program vaksinasi Covid-19 ini.

“Saya mengapresiasi

masyarakat kota Singkawang yang mengikuti program vaksinasi ini. Vaksinasi ini dilaksanakan di dua tempat, yaitu Pavilion 78 dan Singkawang Grand Mall. Dengan vaksinasi, masyarakat sudah membantu pemerintah untuk mengatasi dan menekan angka penyebaran Covid-19 di kota Singkawang.” katanya.

Ia mengatakan masyarakat yang telah divaksin memiliki resiko rendah jika terpapar Covid-19 pasca vaksinasi. Maka dari itu, ia mendorong masyarakat yang belum divaksin untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan vaksinasi.

Selaku ketua Satgas Covid-19, Tjhai Chui Mie beserta jajaran akan terus berupaya agar ketersediaan vaksin terus dipasok ke kota Singkawang. Ia mengatakan kota Singkawang mendapatkan pasokan vaksin dari Polres kota Singkawang sebanyak 2.000 dosis.

“Polda Kalimantan Barat melalui Polres Singkawang terdapat sekitar 2.000 dosis vaksin yang akan dipergunakan. Kemudian dari pemerintah akan datang sekitar 220 vaksin lagi.” ujarnya.



Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan melakukan tanam perdana bibit unggulan di Agrowisata Sagatani Kelurahan Sagatani Kecamatan Singkawang Selatan, Kamis (10/6/2021).

Kegiatan turut dihadiri Wakil Wali Kota Singkawang Irwan, Camat Singkawang Selatan, Lurah Sagatani, tokoh adat serta masyarakat Sagatani.

Wagub Kalbar Ria Norsan melihat Agrowisata Sagatani sebagai salah satu bentuk pembangunan berwawasan lingkungan yang berpotensi menarik para wisatawan domestik dan mancanegara. Norsan berharap masyarakat kota Singkawang, khususnya di kawasan kelurahan Sagatani untuk memberikan dukungan sepenuhnya atas terwujudnya wisata lingkungan.

“Saya berharap masyarakat kota Singkawang, khususnya di kawasan kelurahan Sagatani untuk memberikan dukungan sepenuhnya atas terwujudnya wisata lingkungan. Sehingga, banyak pilihan tempat wisata yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan untuk rekreasi. Ada pilihan untuk menikmati



Agrowisata Sagatani Potensi Pariwisata Singkawang

keindahan gunung, pantai, alam dan lain-lain.” ujar Ria Norsan.

Wakil Wali Kota Irwan menyambut baik kehadiran Agrowisata Sagatani yang melengkapi tujuan destinasi wisata di kota Singkawang. Irwan juga melihat sebuah potensi yang menstimulus kedatangan wisatawan dan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi di tingkat lokal.

“Agrowisata Sagatani ini pasti akan ada multiplier effect, baik secara ekonomi, budaya, dan sektor-sektor lainnya. Tentunya, pembangunan dan perwujudan ini harus didukung oleh Pemerintah kota Singkawang,” katanya.

Sementara, Lurah Sagatani, Muhammad Naziri menjelaskan kehadiran Agrowisata Sagatani dimaksudkan untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hijau di kota Singkawang yang berpotensi wisata dan bernilai ekonomi.

Ia berharap masyarakat sekitar di kawasan Sagatani pun menjadi terpacu untuk menumbuhkan bibit-bibit unggul guna mendorong peningkatan kesejahteraan dan perekonomian daerah. (*)



Irwan Buka Rendang Betta Competition Volume II

Wakil Wali Kota Singkawang, Irwan membuka Rendang Betta Competition Volume II di Singkawang Grand Mall, Sabtu (12/6/2021). Kegiatan ini diselenggarakan secara live streaming dan dipamerkan mulai dari tanggal 11 hingga 13 Juni 2021. Kegiatan ini memperlombakan ikan-ikan cupang berkualitas dengan berbagai kategori dan jenisnya sejumlah 828 ekor.

Irwan mengapresiasi bentuk kegiatan ini yang memberi ruang publik dan fasilitas bagi komunitas untuk bisa menyalurkan hobi, bahkan secara sosial, menguatkan interaksi sesama peserta untuk terus berkreatifitas.

Ia menambahkan hobi memelihara ikan cupang ini juga bernilai ekonomi karena dengan banyaknya masyarakat membudidayakan ikan ini memberikan dampak ekonomi.

“Melihat antusiasme peserta pada hari ini, ikan-ikan cupang ini dapat memberikan warna dan keindahan khususnya bagi penggemar ikan cupang di kota Singkawang. Tidak menutup kemungkinan, kegiatan ini juga bisa

menjadi destinasi wisata bagi penggemar ikan cupang yang mau mengikuti kompetisi seperti ini di kota Singkawang. Tadi saya bersepakat dengan pihak Singkawang Grand Mall untuk kedepannya membuat acara kompetisi yang lebih besar dan meriah.” Kata Irwan.

Sementara Ketua Penyelenggara Rendang Betta Competition Volume II, Deri SP, mengatakan animo masyarakat dalam mengembang-biakkan ikan cupang kian hari kian meningkat. Menurut Deri, dengan adanya ajang kompetisi ini dapat mempererat hubungan antar peserta lomba sekaligus menjadi wadah ekspresi dan apresiasi bagi para penangkar ikan cupang.

“Peserta yang juga peminat ikan cupang ini tidak hanya masyarakat kota Singkawang saja. Khususnya, pada ajang kompetisi ini, panitia mencatat ada beberapa peserta yang mengikuti kompetisi ini berasal dari luar kota Singkawang juga. Ada peserta dari Ketapang, Pontianak, Putusibau, Sambas, dan Melawi.” Ujar Deri, Ketua

Penyelenggara Rendang Betta Competition Volume II.

Ia mengatakan ada kriteria khusus dalam menilai ikan yaitu keindahan, kerapian, bentuk ikan, serta warna.

“Tentunya, kriteria ikan yang berpotensi mengikuti dan memenangkan kompetisi adalah ikan yang sehat. Baik dari segi keindahan warna, kelincahan dan juga hal-hal detail seperti sisik, sirip dan ekornya yang sehat.” Ujarnya.

Deri pun menceritakan ikan-ikan yang mengikuti kompetisi atau bahkan yang menjadi pemenang memiliki prospek yang sangat baik bagi petani ikan tersebut. Deri menyebutkan ikan yang memenangkan kompetisi dalam kategori-kategori yang ditetapkan bisa mencapai jutaan rupiah jika dijual kembali.

“Ikan-ikan yang menang ini kalau dijual harganya bisa mencapai harga Rp500 ribu dan bahkan ikan terbaik dari hasil kompetisi bisa bernilai tinggi Rp3 juta per ekor. Jadi, selain menjalankan hobi memelihara ikan, kegiatan ini juga bisa menambah penghasilan.” Kata Deri. (*)

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie beraudiensi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Sandiaga Uno di Jakarta, Selasa (15/6/2021). Dalam pertemuan tersebut Wali Kota dan Menteri Sandiaga membahas pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di daerah masing-masing.

Pada kesempatan itu, Tjhai Chui Mie menyampaikan proposal terkait kawasan wisata mangrove di Kota Singkawang.

Secara khusus, Menteri Sandiaga memberikan arahan dan instruksi kepada Tjhai Chui Mie, dan meminta untuk menggelar event berskala internasional.

“Untuk Singkawang, saya langsung menugaskan ke ibu, karena ibu ini adalah Wali Kota Kota Tertoleran se-Indonesia,



WALI KOTA SINGKAWANG AUDIENSI DENGAN MENPAREKRAF, INI PESAN SANDIAGA

sudah selayaknya punya event internasional. Karena kita punya Bhineka Tunggal Ika, dan kita ingin buktikan, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling toleran. Jadi narasi-narasi perpecahan, kita lakukan kontra narasi, yaitu event internasional. Ya ini mungkin bisa dikemas baik, bekerja sama dengan dunia usaha. Idenya seperti apa, tapi alangkah hebatnya kalau kita bisa tunjukkan ke mata dunia toleransi Indonesia lewat festival internasional,”

kata Sandi, seperti yang diunggah pada akun Instagramnya, Rabu (16/6/2021).

Menanggapi itu, Kabid Pariwisata Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, Novar Zulfian, mengatakan, pihak siap mendorong program Menteri Pariwisata di Kota Singkawang. “Kami siap, searah dengan instruksi Menteri Pariwisata, bersama kementerian mempersiapkan event internasional, yang mencerminkan kebersamaan dalam keberagaman di kota tertoleran,” kata Novar.

Ia menambahkan, ini menjadi tantangan bagi pihaknya, untuk memajukan Kota Singkawang. “Terlebih pariwisata Singkawang sudah dilirik oleh para wisatawan dunia. Karena itu, Mas Menteri meng-highlight Singkawang sebagai Kota Tertoleran dalam Rakor di Jakarta,” ujarnya. (*)



KOLAM PEMANCINGAN “ALIANYANG” DIRESMIKAN

Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie bersama Dandim 1202/Skw Letkol Inf Candro Edi Wibowo meresmikan kolam pemancingan Alianyang yang berada di area Makodim 1202/Skw, Minggu (27/6/2021). Kegiatan turut dihadiri Wakil Wali Kota Singkawang dan Forkopimda Kota Singkawang.

Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Dandim 1202/Skw dan Walikota Singkawang dilanjutkan dengan panaburan ikan serta mancing perdana pembukaan perlombaan.

Dandim 1202/Skw mengatakan peresmian tersebut guna mensosialisasikan kepada masyarakat luas, bahwa di Kodim Singkawang tersedia kolam pemancingan.

“Kolam pemancingan ini berdayakan pemanfaatan sarana yang ada dan kolam ikan ini pun juga dibuka untuk umum,” kata Dandim.

Menurut Dandim, kolam pemancingan ini juga dapat dijadikan sebagai ruang rekreasi dan silaturahmi setelah menjalani rutinitas kerja yang padat, antara unsur TNI dengan masyarakat.

“Diharapkan pula bisa menjadi magnet bagi masyarakat, sehingga kedekatan antara Kodim 1202/Skw dengan masyarakat Kota Singkawang khususnya, tambah terjalin kekeluargaan yang lebih erat lagi,” harapnya.

Sementara, Wali Kota Tjhai Chui Mie mengapresiasi adanya kolam pemancingan dan perlombaan memancing yang tetap melaksanakan protokol

kesehatan.

“Saat pandemi Covid-19 yang masih melanda ini masyarakat harus senang, kalo senang imun kita naik. Hobinya memancing ya dengan ikut perlombaan seperti ini sudah senang. Padahal belum makan ikan, apa lagi nanti pulang makan. Cara ini baik untuk meningkatkan imun saat pandemi Covid-19 masih berlangsung, tetap memperhatikan protokol kesehatan, menjaga jarak, cuci tangan juga memakai masker,” ungkapnya.





WALI KOTA SINGKAWANG AUDIENSI DENGAN MENPAREKRAF, INI PESAN SANDIAGA

tanahnya para investor memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah kota Singkawang.

"Jika ingin investasi di kota Singkawang, jangan ragu. Pemerintah kota Singkawang siap membantu mempermudah perizinan. Kita akan berupaya sebaik-mungkin. Suatu daerah tidak akan bisa maju jika hanya mengandalkan APBD. Dengan kerjasama semua pihak, terutama pengusaha, ikut berpartisipasi membentuk program CSR seperti yang dilakukan hari ini." Ujarnya.

Sementara, General Manager Mahkota Hotel Singkawang, Aloysius Susilo Utaya mengatakan bahwa trotoar sepanjang jalan Pangeran Diponegoro akan dipercantik melalui pengerjaan pembangunan pedestrian trotoar bagi pejalan kaki (pedestrian).

"Pengerjaan ini akan diselesaikan selama 180 hari dan terhitung dari tanggal 2 juni 2021. Semoga pembangunan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi masyarakat kota Singkawang, khususnya warga sekitar." Kata Aloysius. (*)

Wali kota Singkawang, Tjhai Chui Mie melakukan peletakan batu pertama pengerjaan pembangunan pedestrian trotoar jalan Pangeran Diponegoro, Kamis (17/6/2021).

Wali kota mengapresiasi realisasi disinsentif pengerjaan pembangunan trotoar bagi pejalan kaki yang dilakukan oleh Mahkota Hotel Singkawang.

"Pengenaaan disinsentif ini merupakan upaya pemerintah kota untuk peningkatan kemampuan pengendalian pemanfaatan

ruang sesuai dengan rencana tata ruang di kota Singkawang." Kata Tjhai Chui Mie.

Melalui momen peletakan batu pertama pelaksanaan disinsentif Mahkota Hotel Singkawang ini, Tjhai Chui Mie mengajak seluruh pihak yang berinvestasi di kota Singkawang untuk taat pada administrasi perizinan melalui Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja kota Singkawang.

Tjhai Chui Mie berharap kedepannya para investor memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan

JULI 2021, JADWAL PERSIAPAN PENGADAAN LAHAN AKSES JALAN BANDARA DIMULAI



Pemerintah kota Singkawang melaksanakan rapat koordinasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan akses menuju bandara kota Singkawang dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat secara daring di ruang TCM kantor Wali Kota Singkawang, Selasa (22/6/2021).

Untuk percepatan jalan akses masuk bandara kota Singkawang, Dinas PUPR kota Singkawang telah melaksanakan survei terhadap lokasi yang direncanakan sebagai jalan akses masuk bandara.

Wali kota Singkawang, Tjhai Chui Mie menyampaikan kabar baik bagi Pemerintah kota Singkawang,

dimana Pemerintah Provinsi, dimana kita sudah mendapat penjadwalan persiapan pengadaan tanah pada awal bulan Juli 2021. Jadi, hal-hal selanjutnya yang perlu dilakukan akan segera dilaksanakan." ungkap Tjhai Chui Mie.

Ia mengatakan terdapat 62 orang pemilik tanah yang terkena pembangunan jalan akses menuju bandara kota Singkawang. Sebagai tindak lanjut, Tjhai Chui mengatakan nantinya akan dilaksanakan penandatanganan surat tanah sepanjang 10,5 km dan lebar 50 meter sebagai bentuk penyerahan lahan.

"Dari 62 orang pemilik tanah yang terdampak, sudah sekitar

50 persen pemilik tanah yang menyetujui dan menyerahkan lahan untuk pembangunan jalan akses menuju bandara. Saya berharap masyarakat yang belum memberikan hibah lahan untuk mempertimbangkan, karena pembangunan infrastruktur jalan ini adalah investasi bersama." ujarnya.

Tjhai Chui Mie mengapresiasi masyarakat kota Singkawang yang telah bersedia menyerahkan lahan kepada Pemerintah kota Singkawang untuk mendukung proses pembangunan lahan akses menuju bandara. Menurutnya, dukungan konkrit dari masyarakat membantu percepatan perwujudan pembangunan lahan akses menuju bandara.

"Jika lahan untuk akses jalan menuju bandara belum siap, sampai kapanpun tidak akan bisa dibangun. Maka, itulah pentingnya pembebasan lahan ini. Setelah penyerahan lahan sudah rampung, maka kami akan melanjutkan ke tahap selanjutnya dengan mengajukan anggaran kepada Pemerintah Pusat." ujarnya. (*)

Pemkot Gelar Sosialisasi Dana Hibah dan Bansos



pembangunan Singkawang,” kata Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie saat membuka kegiatan.

Ia mengatakan belanja hibah yang digelontorkan Pemerintah kota Singkawang sebesar Rp13 Miliar yang diberikan kepada 159 penerima. Sedangkan, untuk belanja bantuan sosial dianggarkan sebesar Rp1,5 miliar kepada 78 penerima.

“Secara keseluruhan untuk tahun 2021, dana bantuan hibah dan bantuan sosial mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2017 hingga tahun 2020,” katanya.

Tjhai Chui Mie menghimbau kepada penerima hibah dan bantuan sosial agar lebih peka dalam mengupayakan pertanggungjawaban yang telah diberikan.

“Pada kegiatan ini, Pemerintah kota Singkawang menghadirkan Ikatan Notaris Indonesia (INI) kota Singkawang dimana kita ingin masyarakat

yang menerima hibah dan bantuan sosial dapat mengetahui dan memutuskan kegiatan dan kepentingan yang menyesuaikan kebutuhan. Sehingga, dana yang diterima dimanfaatkan dan dipergunakan sebaik-baiknya dan sejalan dengan pembangunan kota Singkawang,” ujarnya.

Ia mendorong kepada setiap penerima hibah dan bantuan sosial untuk berkonsultasi terkait kelengkapan dokumen dengan pihak INI kota Singkawang. Dengan sarana konsultasi yang baik, diharapkan setiap penerima hibah dan bantuan sosial terhindar dari kasus dan musibah yang tidak diharapkan.

“Maka dari itu, sosialisasi ini digelar agar penerima hibah dan bantuan sosial dapat mengarahkan dana bantuan dan terhindar dari kasus-kasus yang tidak diharapkan. Mari penggunaan dana bantuan ini untuk kebutuhan masyarakat banyak dan memberikan efek bagi peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya pembangunan.” ujarnya. (*)

Pemerintah kota Singkawang menggelar sosialisasi penerima hibah dan bantuan sosial APBD kota Singkawang tahun 2021 di Balaiung Kantor Wali Kota Singkawang, Senin (31/5/2021).

“Dana hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan oleh Pemerintah kota Singkawang pada tahun 2021 didasarkan pada program prioritas guna percepatan

ZONA INTEGRITAS

Korsup Wilayah III KPK Gelar MCP dan Monev di Singkawang

Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pertemuan bersama Pemerintah kota Singkawang di ruang rapat Wali Kota, Rabu (9/6/2021). Pertemuan ini dimaksudkan untuk rapat koordinasi (rakor) monitoring center for prevention (MCP) dan monev tematik pendapatan, aset, perijinan, pengadaan, dan manajemen ASN Pemerintah Kota Singkawang.

Direktorat Korsup Wilayah III KPK dihadiri Irawati, Untung Wicaksono, dan Renta Marinto. Hadir pula pada pertemuan tersebut, Wakil Wali Kota Singkawang, Irwan Sekretaris Daerah Sumastro, Kepala OPD, Kepala Cabang Bank Kalbar Singkawang, Kepala Kantor Pertanahan kota Singkawang dan undangan lainnya.

Irawati mengatakan tim Direktorat Korsup Wilayah III KPK yang pada saat itu hadir berfokus pada pendampingan atau kemitraan dengan Kementerian Lembaga maupun Pemerintah Daerah dalam hal tata kelola pemerintahan.

“Kedatangan kami hari ini adalah sebagai mitra Pemerintah kota Singkawang, bukan sebagai penyidik atau auditor. Khususnya, terkait masukan ataupun kendala-kendala yang ditemui pemerintah daerah. Kami mempunyai tools yaitu Monitoring Center Prevention (MCP) yang meliputi 8 program intervensi, yaitu APIP, perizinan, perdagangan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran APBD, manajemen ASN, tata kelola dana desa, optimalisasi pendapatan daerah, dan manajemen aset daerah.” Jelas Irawati.

Sekretaris Daerah Singkawang, Sumastro mengapresiasi kedatangan tim Direktorat Korsup



Wilayah III KPK pada giat rakor MCP dan monev tematik pendapatan, aset, perijinan, pengadaan, dan manajemen ASN Pemerintah kota Singkawang ini.

Ia mengatakan pendampingan tim Direktorat Korsup Wilayah III KPK ini membantu kesungguhan Pemerintah kota Singkawang untuk mewujudkan rencana aksi. Ia berharap kepada perangkat daerah Kota Singkawang yang dinilai belum menunjukkan indikasi kinerja yang jelas agar menyusun rencana aksi yang terukur, baik pokok pekerjaan dan target waktu pencapaiannya.

“Pada 8 program intervensi tersebut, hal-hal yang berkaitan dengan agenda Pemerintah kota Singkawang menjadi lebih jelas dan bersih. Dengan begini, jika ada indikasi kinerja OPD yang dinilai belum maksimal, kedepannya dapat memberikan kontribusi yang maksimal. Mudah-mudahan, perkembangan kita dinilai positif dengan adanya keseriu-

san yang dilakukan oleh Pemerintah kota Singkawang melalui OPD terkait.” Kata Sumastro.

Sementara, Wakil Wali Kota Irwan menyambut baik kedatangan tim Direktorat Korsup Wilayah III KPK pada rapat koordinasi ini. Irwan mengatakan pendampingan atau kemitraan ini dapat membantu mengantisipasi pelayanan yang kurang maksimal kepada masyarakat kota Singkawang.

Ia mengatakan bahwa pencapaian MCP kota Singkawang saat ini berada situasi yang baik (zona hijau). Irwan pun mengingatkan agar tidak cepat puas dengan pencapaian yang ada. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan pula agar perangkat daerah terkait dapat menjalin koordinasi yang baik dengan tim Direktorat Korsup Wilayah III KPK.

“MCP kota Singkawang saat ini berada di zona hijau. Namun, kita tidak bisa cepat puas dan perlu langkah-langkah yang baik kedepannya untuk mempertahankan pencapaian ini. Tentunya, rapat koordinasi ini adalah upaya yang baik untuk bersama-sama mencari solusi terhadap kendala-kendala yang ditemui.” Ungkap Irwan. (*)

Peran Penting Humas Dalam KIP



Kehadiran Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi sangat penting yang mengemban tugas sebagian fungsi kehumasan setelah peralihan dari Bagian Humas yang berada di Sekretariat Daerah sesuai dengan petunjuk Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara dan perubahan nomenklatur untuk di Sekretariat Daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Setda Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sebagai garda terdepan dalam penyampaian informasi kepada publik, humas memiliki peranan yang cukup penting dalam pengimplementasian undang-undang tersebut. Terlebih lagi undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik untuk menjamin tersedianya informasi publik yang terbuka untuk publik dan dapat diakses secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan dengan cara sederhana dandengan adanya undang-undang keterbukaan informasi publik, humas dituntut bisa bekerja profesional. Terutama dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang kegiatan apa yang dilakukan pemerintah, baik melalui dokumentasi internal maupun menyampaikan ke publik melalui media.

Disahkannya UU No.14 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Pemerintah membawa konsekuensi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang melindungi hak atas informasi bagi warga negara Indonesia. Badan publik—dalam hal ini adalah lembaga-lembaga negara, lembaga publik non pemerintah, dan perusahaan-perusahaan publik yang mendapat dana alokasi dari APBN, APBD, bantuan luar negeri, dan himpunan masyarakat—mempunyai kewajiban untuk memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien kepada publik dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan pemerintahan yang semakin baik di Indonesia.

Undang-undang ini mendefinisikan informasi publik sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- Kedudukan Humas dalam Organisasi

Humas/Public Relations (PR) adalah menilai sikap masyarakat agar tercipta keserasian antara masyarakat dan kebijaksanaan organisasi/instansi. Karena mulai dari aktivitas, program Humas, tujuan hingga sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi/ instansi tersebut tidak terlepas dari dukungan serta kepercayaan citra positif dari pihak publiknya.

Humas saat ini banyak dipraktekkan di berbagai organisasi dalam rangka menunjang organisasi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Profesi Humas menjadi posisi yang strategis dengan banyak kriteria yang harus dimiliki seseorang yang akan bergerak sebagai praktisi Humas suatu instansi atau organisasi.

Biasanya Humas/PR akan melakukan strategi komunikasi yang persuasive yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: Informasi atau pesan yang disampaikan harus berdasarkan pada kebutuhan atau kepentingan khayalak sebagai sasarannya. PR sebagai komunikator dan sekaligus mediator berupaya membentuk sikap dan pendapat yang positif dari masyarakat melalui stimulus tertentu mendorong public untuk berperan serta dalam aktivitas organisasi badan instansi agar tercipta perubahan sikap dan penilaian (Perubahan dari situasi negative menjadi situasi positif).

- Peran Humas Pemerintah

Humas Pemerintah mempunyai peran penting dalam membuka ruang bagi publik untuk mendapatkan akses informasi publik. Adanya UU KIP, merupakan momentum bagi Humas Pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan informasi, penerangan, dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, aktivitas, dan langkah-langkah pemerintah secara terbuka, transparan, jujur dan objektif. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat, termasuk media, bila tidak akurat, cepat, dan mudah, dapat menyebabkan kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak informatif, dan tidak membunji.

Disinilah tantangan Humas Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi dalam memperoleh keterbukaan informasi, khususnya menyangkut pelayanan terhadap publik. Tentu saja hal ini tidak mudah untuk merubah perilaku pemberi informasi (dalam hal ini adalah pejabat publik), yang semula mereka “lebih senang” dilayani, kini dengan adanya UU KIP mereka harus melayani informasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi.

Humas Pemerintah mempunyai peran penting dalam membuka ruang bagi publik untuk mendapatkan akses informasi publik. Adanya UU KIP, merupakan momentum bagi Humas Pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan informasi, penerangan, dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, aktivitas, dan langkah-langkah pemerintah secara terbuka, transparan, jujur dan objektif. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat, termasuk media, bila tidak akurat, cepat, dan mudah, dapat menyebabkan kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak informatif, dan tidak

membumi.

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan dan pengambil kebijakan membutuhkan corong penyampaian informasi. Begitu juga masyarakat sebagai objek yang menikmati pembangunan dan pelaksana kebijakan juga harus mengetahui sumber informasi yang tepat. Sesuai dengan program yang dijalankan.

Humas adalah corong informasi bagi sebuah lembaga, artinya, informasi yang dikeluarkan oleh lembaga hanya boleh keluar dari satu pintu, yaitu humas. Hal ini untuk menjaga bias dan keambiguan atas informasi yang dikeluarkan oleh lembaga. Dengan demikian, setiap pengambil kebijakan dalam lembaga harus memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada humas atas kebijakan yang dikeluarkannya, yang kemudian akan diinformasikan kepada publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan langkah strategis dalam mengawal dan mewujudkan tata kelola negara yang bersih, profesional dan berwibawa, serta mengembangkan tatanan masyarakat informasi yang sehat. Dengan demikian, humas peran tidak hanya sebagai corong lembaga semata, akan tetapi ia juga menjadi media komunikatif yang menghubungkan lembaga dan masyarakat, sehingga menghasilkan timbal-balik yang positif dan saling menguntungkan.

Dinamika perubahan menuntut Humas pemerintah lebih adaptif atas perkembangan global, regional maupun nasional. Profesi humas adalah profesi terbuka, yang dapat diakses oleh siapapun yang memiliki kompetensi. Untuk itu, mempersiapkan praktisi humas pemerintah yang berwawasan luas kini bukan semata tuntutan, tapi kebutuhan. (*)





**MEDIA CENTER SINGKAWANG
BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA SINGKAWANG**

Alamat : Jalan Ahmad Yani, Nomor 76 Singkawang Kode Pos 79123
Telp. (0562) 42013158 Fax. (0562) 42013158
Email : kominfo@singkawangkota.go.id website : kominfo.singkawangkota.go.id